

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai tentunya harus ada dukungan serta keikutsertaan dari setiap anggotanya baik secara mental maupun emosional. Keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan merupakan partisipasi seseorang yang patut kita hargai, serta diharapkan ada manfaat serta tujuan atas keikutsertaan tersebut. Partisipasi ditandai dengan adanya keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok baik moril maupun materil, serta adanya rasa tanggung jawab.

##### 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, partisipasi masyarakat berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dan *capere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga dapat diartikan bahwa partisipasi adalah mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktifitas atau kegiatan politik suatu negara.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi berarti ada keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan. Ada beberapa konsep partisipasi yang dijelaskan dalam KBBI, yaitu:

- a. Partisipasi sebagai kebijakan, yaitu konsep yang memandang partisipasi sebagai produser konsultasi para pembuat kebijakan

kepada masyarakat sebagai subyek pengelolaan keuangan daerah,

- b. Partisipasi sebagai strategi, yaitu untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas yang dikeluarkan pemerintah.
- c. Partisipasi sebagai alat komunikasi, bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan rakyat.
- d. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, konsep yang melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan keracunan yang ada di masyarakat.

Menurut Histiraludin, partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan". (Handayani 2006: 39-40)

Selanjutnya, partisipasi Menurut Made Pidarta adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. (Siti Irene Astuti D, 2009: 31-32)

Kemudian, partisipasi masyarakat dapat diartikan pula sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. (Isbandi, 2007: 27). Partisipasi dapat dibagi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. (Mikkelsen, 1999: 64)

Menurut Pasaribu dan Simanjutak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di selenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (Siti Fatimah, 2012: 10)

Sementara itu, menurut Sumaryadi (2010) Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dapat dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.

- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. (Siti Irene, 2011: 55)

Adapun indikator partisipasi masyarakat menurut Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko (2015: 82); (Mustanir, Ahmad; Abadi, 2016) antara lain sebagai berikut :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah setiap program pembangunan termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan.
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi program/proyek pembangunan sangat diperlukan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan karena tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan bersama.

Dari beberapa definisi menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap pemerintah secara

individu maupun kelompok dalam melakukan kegiatan pembangunan, dan ikut serta mulai dari proses perencanaan hingga proses mengevaluasi perubahan yang terjadi dan menikmati hasil-hasil pembangunan dan dengan menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Secara Teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, besarnya pendapatan dan lamanya tinggal di suatu wilayah dengan tingkat partisipasi yang dilakukan seseorang didalam kegiatan pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden (1988), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Faktor Internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin,

pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1994). Secara teoritis terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994).

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah : Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk partisipasi yang ada pada :

- 1) Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
- 2) Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- 3) Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk

berpartisipasi neranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsidan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

- 4) Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat brtetntangan dengan konsep-konsep yang ada.

b. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam Jurnal Tata Loka, 2003: 9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting.

Pendapat lain menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) Adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat dan penolakan eksternal terhadap pemerintah. (2) Kurangnya dana. (3) terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan masyarakat, dan (4) Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Effendi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. (Siti Irene, 2001: 58) Menurut Keith Davis (Intan dan Mussadun, 2013: 34) Dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa :

- a. Pikiran, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- b. Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- c. Pikiran dan Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama.
- d. Keahlian, merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal tersebut menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.

- e. Barang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.

Menurut Isbandi dalam Deviyani (2013:3) menyatakan ada beberapa bentuk partisipasi, antara lain :

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- b. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program.
- c. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda biasanya berupa alat-alat atau perkakas.

Berdasarkan definisi menurut beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan seseorang dalam situasi berkelompok untuk memberikan sumbangan dalam suatu kegiatan meliputi pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian/keterampilan, barang, dan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan seseorang dalam mengikuti Program Kampung Sehat, Bersih dan Kreatif (SBK) di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

#### 4. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Wilcox 1988 (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:86) mengemukakan adanya 5 (lima) tahapan dalam partisipasi, yaitu :

- a. Memberikan informasi (*information*);
- b. Konsultasi (*Consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- d. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dalam menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- e. Memberikan dukungan (*supporting independet community interest*), dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Partisipasi masyarakat juga berarti adanya keterlibatan langsung bagi warga dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol serta koordinasi dalam mempertahankan hak-hak sosialnya. Jika dikaitkan dengan tingkat kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat dikaitkan dengan partisipasi sebagaimana dijelaskan oleh Shery Arstein, maka peran serta masyarakat dalam perencanaan dapat dibedakan ke dalam anak tangga sebagai berikut :

- a. *Citizen power* : Pada tahap ini terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Tingkatan meliputi kontrol masyarakat, pelimpahan, dan kemitraan.
- b. *Tokenism* : Pada tahap ini hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memerikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Tingkatan meliputi penentraman, konsultasi, dan informasi.
- c. *Non Participation* : Pada tahap ini masyarakat hanya menjadi objek. Tingkatan ini meliputi terapi dan manipulasi. Berdasarkan anak tangga dapat diasumsikan bahwa partisipasi yang mampu menggerakkan dinamika masyarakat adalah partisipasi yang diklasifikasikan ke dalam *citizen power*, karena dalam konteks inilah terdapat keterlibatan masyarakat sipil sebagai pilar penting dalam menggerakkan masyarakat demokratis. Secara khusus lagi Peter Oakley mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
  - 1) *Manipulation* : tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indotrinasi.
  - 2) *Consultation* : Stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
  - 3) *Consensus building* : Pada tingkatan ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok.

- 4) *Decision-making* : Consensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu.
- 5) *Risk-taking* : Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan impikasi.
- 6) *Partnership* : Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.
- 7) *Self-management* : Puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian. (Siti Irene, 2011: 66)

##### 5. Motif Partisipasi Masyarakat

Menurut Billah (dalam Huraerah 2008:105 – 107), ada lima (5) motif partisipasi masyarakat yang bisa bekerja sendirian maupun bersamaan. Kelima motif tersebut adalah :

###### a. Motif Psikologi

Kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, atau rasa telah mencapai sesuatu (*achievement*) dapat merupakan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan, termasuk juga untuk berpartisipasi meskipun kegiatan atau partisipasinya itu tidak akan menghasilkan keuntungan (baik berupa uang ataupun materi).

b. Motif Sosial

Ada dua sisi motif sosial, yakni untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindarkan dari terkena pengendalian status sosial (*social control*). Orang akan dengan senang hati berpartisipasi didalam suatu kegiatan (pembangunan) manakala keikutsertaannya itu akan membawa dampak meningkatnya status sosialnya. Pada sisi yang negatif, orang akan terpaksa berpartisipasi dalam suatu kegiatan (pembangunan) karen takut terkena sanksi sosial (tersisih atau dikucilkan oleh warga masyarakat). Motif semacam ini dikendalikan oleh norma-norma sosial yang masih kuat di dalam masyarakat, terutama yang masih bersifat keguyuban.

c. Motif Keagamaan

Motif ini didasarkan pada kepercayaan kepada kekuatan yang ada diluar manusia (Tuhan; sesuatu yang gaib; supernatural). Agama sebagai ideologi sosial yang memiliki berbagai macam fungsi bagi pemeluknya, yaitu fungsi inspiratif, normatif, integratif dan operatif/motivatif. Melalui aktualisasi fungsi-fungsi tersebut, agama dapat meningkatkan perannya didalam proses pembangunan, dan lebih dari itu agama dapat meningkakan peran para pemeluknya dalam proses pembangunan.

d. Motif Ekonomi

Laba (*profit*) adalah motif ekonomi yang dapat dan bahkan seringkali efektif mendorong seseorang mengambil keputusan untuk ikut berpartisipasi didalam kegiatan (pembangunan). Pengambilan keputusan (yang bersifat ekonomis) dapat mengambil dua bentuk strategi, yaitu maksimum profit dan

minimum profit. Dengan menggunakan tata nalar ekonomi, masyarakat akan memutuskan untuk berpartisipasi jika akan mendapatkan keuntungan. Setidaknya ia tidak akan rugi jika berpartisipasi atau paling tidak kerugian yang diperoleh dari partisipasi akan lebih kecil daripada kerugian karena tidak ikut berpartisipasi;

e. Motif Politik

Dasar utama motif politik adalah kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besar kecilnya kekuasaan yang dapat diperoleh dari partisipasinya didalam berbagai kegiatan (pembangunan).

**B. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Sehat, Bersih dan Kreatif (SBK).**

Program Kampung Sehat, Bersih dan Kreatif (SBK) adalah program yang dibentuk pertama kalinya oleh DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kalimantan Tengah bekerjasama dengan VES Community Kalimantan Tengah dan CBR Club Kota Palangka Raya. Program ini merupakan program pelestarian lingkungan yang akan diadakan secara berkala yaitu setiap satu tahun sekali di beberapa daerah yang ditunjuk sebagai wakil dari masing-masing Rukun Tetangga (RT) di masing-masing kelurahan Kota Palangka Raya terutama kalangan generasi muda. Program ini dikemas dalam bentuk kompetisi. Sehingga bagi RT/RW yang bisa melakukan pelestarian lingkungan dengan sangat baik dan dengan partisipasi maksimal akan berpotensi menjadi pemenang.

Menurut keputusan DPD AMPI Kalimantan Tengah bersama penyelenggara, tim penilaian dari program Kampung Sehat, Bersih dan Kreatif (SBK) adalah adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palangkaraya, yang didalam nya juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangkaraya merupakan pihak-pihak yang nantinya akan membantu dalam pengimplementasian program Kampung SBK tersebut.

### **1. Tujuan Program Kampung SBK**

Adapun tujuan dari Kegiatan atau Program Kampung Sehat, Bersih, dan Kreatif (SBK) Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan lingkungan yang bersih dan kreatif;
- b. Memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas/pekerjaan sehari-hari;
- c. Membudayakan masyarakat untuk hidup sehat dan bersih;
- d. Membangkitkan semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial di kalangan generasi muda.

### **2. Kegiatan dalam Program Kampung Sehat, Bersih dan Kreatif (SBK)**

- a. Kebersihan dan Kreatifitas Lingkungan;
- b. Penghijauan;
- c. Inovasi Pengolahan Sampah;
- d. Ketersediaan dan Perawatan Fasilitas Kebersihan;
- e. Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat tentang Kebersihan.